COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA TOLERANSI DI KOTA SINGKAWANG

Gina Agrivina
NPP. 32.0693

*Asdaf Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: 32.0693@praja.ipdn.ac.id*

Pembimbing Skripsi: Dr. Ani Martini, S.STP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Problem Statement/Background (GAP):*

*The growing social diversity in multicultural cities such as Singkawang requires effective governance that can manage pluralism and foster tolerance. However, coordination among stakeholders is often fragmented, limiting the potential for inclusive social harmony. This study focuses on the challenge of implementing collaborative governance as a strategy to build a tolerant city through multi-sector cooperation. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in fostering a tolerant city in Singkawang, with a focus on stakeholder participation, institutional partnerships, democratic decision-making, decentralization, social networks, and adaptability. **Method:** This research applies a qualitative descriptive approach to deeply understand the complex social interactions and governance practices. Data were collected through interviews with 10 purposively selected informants from local government, community leaders, religious organizations, and civil society, as well as document analysis and observations. **Result:** The findings indicate that collaborative governance in Singkawang has been realized through active participation, cross-sector partnerships, transparent decision-making, and adaptive policy implementation. Nevertheless, challenges such as uneven stakeholder involvement, institutional limitations, and coordination gaps remain. **Conclusion:** Collaborative governance in Singkawang contributes positively to social tolerance, but requires strengthening through enhanced inclusivity, institutional capacity building, and flexible conflict resolution mechanisms to sustain long-term harmony.*

Keywords: *Collaborative governance, Tolerance, Local Government*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keragaman sosial yang meningkat di kota multikultural seperti Singkawang menuntut tata kelola yang efektif untuk mengelola pluralisme dan membangun toleransi. Namun, koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali terfragmentasi sehingga membatasi potensi terciptanya harmoni sosial yang inklusif. Penelitian ini memfokuskan pada tantangan pelaksanaan *collaborative governance* sebagai strategi membangun kota toleran melalui kerjasama lintas sektor. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan *collaborative governance* dalam mewujudkan kota toleran di Singkawang, dengan fokus pada partisipasi pemangku kepentingan, kemitraan kelembagaan, pengambilan keputusan demokratis, desentralisasi, jaringan sosial, dan adaptabilitas kebijakan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami interaksi sosial dan praktik tata kelola secara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara

dengan 10 informan yang dipilih secara purposif dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil, serta analisis dokumen dan observasi lapangan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* di Singkawang telah terwujud melalui partisipasi aktif, kemitraan lintas sektor, pengambilan keputusan yang transparan, dan pelaksanaan kebijakan yang adaptif. Namun, tantangan seperti ketimpangan keterlibatan pemangku kepentingan, keterbatasan kelembagaan, dan kesenjangan koordinasi masih ditemukan. **Kesimpulan:** *Collaborative governance* di Singkawang memberikan kontribusi positif terhadap toleransi sosial, tetapi perlu diperkuat melalui peningkatan inklusivitas, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta mekanisme penyelesaian konflik yang fleksibel agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan. **Kata Kunci:** Tata Kelola Kolaboratif, Toleransi, Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu toleransi di Indonesia terus menjadi perhatian penting dalam pembangunan sosial, khususnya di wilayah multikultural seperti Kota Singkawang. Kota ini dikenal memiliki keragaman etnis dan agama yang tinggi, sehingga pengelolaan kehidupan sosialnya menuntut pendekatan kolaboratif dan inklusif dari pemerintah daerah. Dalam konteks ini, *Collaborative governance* menjadi pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan integrasi sosial dan mendorong terciptanya kota toleran yang stabil secara sosial dan politik (Ansell & Gash, 2008).

Konsep *Collaborative governance* menekankan perlunya keterlibatan aktif berbagai aktor baik dari sektor pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, maupun komunitas lokal—dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik secara bersama-sama. Ansell dan Gash (2008) menyatakan bahwa tata kelola kolaboratif mengandalkan proses deliberatif, berbasis konsensus, dan bersifat formal antara aktor negara dan non-negara untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam konteks ini, model kolaboratif tidak hanya relevan sebagai kerangka teoritis, tetapi juga sebagai strategi praktis dalam mengelola keragaman dan mencegah konflik sosial di daerah multietnis.

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menambahkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada desain kelembagaan yang adaptif, kepemimpinan yang fasilitatif, dan hubungan antaraktor yang dibangun atas dasar kepercayaan. Studi ini menegaskan pentingnya membangun jaringan kerja horizontal antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dalam merancang kebijakan yang menjamin inklusivitas sosial (Madjid et al., 2024; Miles & Huberman, 1992).

Hal ini diperkuat oleh temuan Primastuti et al. (2023) yang meneliti struktur kolaborasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di mana keberhasilan program sangat ditentukan oleh interaksi intensif dan sinergi antar pemangku kepentingan. Di sisi lain, pendekatan kolaboratif juga terbukti efektif dalam pengelolaan program sosial dan pembangunan komunitas, sebagaimana dibahas oleh Sitompul dan Athahirah (2016) dalam kajian mereka mengenai program CSR pendidikan. Mereka menemukan bahwa kemitraan antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam menciptakan program yang adaptif dan berkelanjutan (Wahyudi & Ilham, 2021).

Pandangan serupa disampaikan oleh Sitepu dan Maulana (2021) yang menyoroti tata kelola program pembangunan berbasis CSR yang menuntut adanya mekanisme kolaboratif untuk memperkuat legitimasi dan efisiensi kebijakan lokal. Dalam konteks penguatan nilai toleransi, peran pemerintah kota juga sangat krusial. Penelitian Chumairah dan Al-Hamdi (2019) menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil membangun citra sebagai “City of Tolerance” melalui strategi komunikasi lintas budaya, dialog antarumat beragama, serta regulasi inklusif (Warren, Sulaiman, & Jaafar, 2014).

Lebih lanjut, studi Kelvin et al. (2022) menekankan bahwa model kolaborasi pentahelix mampu menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan komunitas lokal dalam pembangunan desa cerdas, sedangkan meta-analisis oleh Velby dan Yuadi (2023) menyimpulkan bahwa efektivitas *Collaborative governance* dalam pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada integrasi aktor lintas sektor dengan kepemimpinan inklusif. Konteks ini memperkuat argumentasi bahwa membangun kota toleransi tidak dapat diserahkan pada pemerintah semata, melainkan harus menjadi hasil kerja bersama yang terstruktur dan strategis (Bianti & Bakry, 2024).

Meski demikian, kolaborasi antaraktor tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Studi Onyango (2024) di Kenya memperlihatkan bahwa kolaborasi sektor publik kerap menemui tantangan seperti ketimpangan kekuasaan, dominasi aktor tertentu, dan lemahnya komitmen kolektif. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai koordinator dan fasilitator menjadi krusial dalam menciptakan arena kolaboratif yang adil dan efektif (Tan, 2020).

Berangkat dari problematika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Collaborative governance* dalam mewujudkan kota toleransi di Kota Singkawang. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji peran pemerintah daerah, dinamika antaraktor kolaboratif, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam menjaga harmoni sosial di wilayah yang plural (Sugiyono, 2018).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pengelolaan keberagaman sosial di kota-kota multikultural seperti Singkawang menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah dalam menciptakan harmoni dan toleransi antar kelompok etnis dan agama. Meskipun Singkawang dikenal sebagai kota toleran, masih terdapat indikasi konflik sosial dan ketegangan yang muncul akibat kurang optimalnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Pendekatan *Collaborative governance* dianggap sebagai solusi yang efektif, namun implementasinya di tingkat lokal masih minim kajian dan pemahaman mendalam.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada kajian teori kolaborasi secara umum atau penerapan governance di kota besar yang memiliki konteks sosial dan politik berbeda. Studi yang menelaah secara spesifik praktik *Collaborative governance* dalam mewujudkan kota toleran, khususnya di kota-kota kecil dan multikultural seperti Singkawang, masih sangat terbatas. Selain itu, peran serta dinamika aktor pemerintahan, masyarakat sipil, dan komunitas budaya dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan masih kurang dieksplorasi secara komprehensif (Pambayun, Pregiwati, & Hapsari, 2021).

Lebih jauh, hambatan struktural seperti ego sektoral, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan kurangnya mekanisme formal dalam mengelola kolaborasi menjadi isu yang jarang diangkat secara empiris dalam konteks lokal. Padahal, faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap efektivitas tata kelola sosial dan keberhasilan pembangunan kota toleran. Studi oleh Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi memerlukan desain kelembagaan yang jelas dan kepemimpinan fasilitatif, namun bagaimana hal ini diwujudkan dalam konteks Singkawang belum terjawab.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kesenjangan tersebut, yakni kurangnya pemahaman mendalam tentang praktik *Collaborative governance* dalam konteks nyata mewujudkan kota toleran di Singkawang, serta bagaimana peran dan dinamika antaraktor dapat diperkuat untuk mengatasi tantangan sosial dan politik yang ada. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan tata kelola kolaboratif yang adaptif dan berkelanjutan di wilayah yang plural (Madjid et al., 2024; Miles & Huberman, 2002).

1.3. Penelitian Terdahulu

(Ansell & Gash, 2008) dalam artikel klasiknya yang diterbitkan di *Journal of Public Administration Research and Theory* merumuskan secara sistematis kerangka *Collaborative governance* sebagai proses formal dan deliberatif yang melibatkan aktor negara dan non-negara dalam pengambilan keputusan kolektif. Kerangka yang mereka tawarkan telah menjadi rujukan penting dalam kajian kebijakan publik, termasuk pada konteks tata kelola inklusif seperti dalam studi tentang kota toleransi. Kontribusi teoretis dari artikel ini sangat esensial dalam menyusun desain kelembagaan kolaboratif di tingkat lokal.

(Fung, 2006) melalui tulisannya di *Public Administration Review* menekankan adanya variasi dalam partisipasi masyarakat pada tata kelola kompleks, mulai dari konsultasi simbolis hingga keterlibatan penuh dalam pengambilan keputusan. Kajian ini memperkaya pemahaman tentang spektrum partisipasi warga dalam kebijakan kolaboratif, terutama dalam penguatan prinsip toleransi melalui peran aktif masyarakat.

Selanjutnya, (Emerson et al., 2012) menawarkan sebuah kerangka integratif dalam *Journal of Public Administration Research and Theory* yang menggabungkan dinamika sistem, struktur kelembagaan, dan perilaku aktor dalam proses *Collaborative governance*. Kerangka ini relevan untuk memahami bagaimana sinergi antar aktor bisa menciptakan nilai publik, khususnya dalam tata kelola sosial yang kompleks seperti kota multikultural.

Dalam dimensi kontestasi kebijakan, (Lewis, 2018) menyoroti “*Prevent*” sebagai sebuah kontroversi kebijakan yang sukar diselesaikan (*intractable policy controversy*), dalam *Journal for Deradicalization*. Meski konteksnya adalah kebijakan kontra-radikalisasi di Inggris, analisis ini menampilkan bagaimana resistensi terhadap kebijakan bisa dikurangi melalui proses deliberatif dan inklusif gagasan yang sejalan dengan semangat kota toleransi.

(Cepiku & Meneguzzo, 2011) dalam artikel mereka di *International Journal of Public Administration* membandingkan pendekatan *New Public Management* dan *New Weberianism* dalam reformasi administrasi publik di Italia. Pembahasan mereka relevan dalam menimbang bagaimana reformasi birokrasi dapat mendukung struktur tata kelola kolaboratif yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Sementara itu, (Maine, 2025) dalam kajian sistematiknya di *International Public Management Journal* mengevaluasi posisi korporasi pemerintah daerah (*municipal corporations*) dalam diskursus administrasi publik nasional dan internasional. Studi ini penting dalam memahami peran aktor pemerintah lokal dalam konteks kolaborasi lintas sektor, terutama dalam pembangunan kota yang adil dan inklusif.

(Elston et al., 2024) dalam *Journal of Policy Analysis and Management* mengeksplorasi dampak kerja sama antar pemerintah daerah terhadap program bantuan sosial di Inggris. Hasil studi menunjukkan bahwa kolaborasi antarwilayah mampu meningkatkan efektivitas distribusi bantuan temuan yang berpotensi diterapkan dalam penguatan fungsi pelayanan sosial di kota toleran.

(Onyango, 2024) dalam artikelnya yang terbit di *Journal of the Knowledge Economy* menelaah dinamika sosial dalam kolaborasi sektor publik di Kenya. Ia menggarisbawahi berbagai tantangan dalam mewujudkan tindakan bersama (*joint action*), mulai dari ketimpangan kekuasaan hingga perbedaan persepsi antar aktor. Wacana ini memperkaya diskusi tentang prasyarat dan hambatan dalam implementasi *Collaborative governance* di negara berkembang.

(Primastuti et al., 2023) dalam artikel yang dipublikasikan pada *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan* menganalisis kolaborasi antaraktor dalam pengendalian inflasi daerah dengan pendekatan *social network analysis* (SNA). Penelitian ini menemukan bahwa aktor utama dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Cilacap memiliki peran strategis dalam membentuk sinergi lintas lembaga. Artikel ini menambah pemahaman tentang praktik

Collaborative governance pada isu-isu ekonomi daerah, dan ditulis oleh para peneliti yang aktif dalam kajian manajemen pemerintahan.

(Sitompul & Athahirah, 2016) melalui kajiannya dalam *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* menyoroti kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di sektor pendidikan. Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program CSR tidak hanya tergantung pada kontribusi dunia usaha, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah membangun kemitraan. Artikel ini menjadi salah satu kontribusi penting dari kalangan akademisi yang fokus pada kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah.

Dalam studi yang dimuat di *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, (Br Sitepu & Maulana, 2021) mengevaluasi tata kelola program CSR melalui pendekatan *Collaborative governance*. Hasil penelitian mereka memperlihatkan bahwa keterlibatan aktif antara perusahaan dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan CSR mampu meningkatkan efektivitas program pembangunan yang inklusif. Kajian ini memperkuat relevansi pendekatan kolaboratif dalam konteks kebijakan sosial dan ekonomi lokal.

Sementara itu, (Chumairah & Al-Hamdi, 2019) dalam artikelnya di *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* mengkaji dinamika toleransi di Kota Yogyakarta, dengan fokus pada peran pemerintah kota dalam membentuk kota toleran. Studi ini menekankan bahwa toleransi tidak hanya dibangun melalui kebijakan formal, tetapi juga melalui interaksi dan representasi budaya yang inklusif. Artikel ini sangat relevan dengan skripsi tentang kota toleransi, khususnya karena berasal dari penulis yang aktif dalam studi tata kelola sosial.

Penelitian oleh (Kelvin et al., 2022) yang diterbitkan dalam *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (J-3P)* membahas model penta-helix dalam pembangunan desa pintar. Artikel ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana pendekatan kolaboratif dapat diadaptasi dalam konteks pembangunan lokal berbasis teknologi dan masyarakat. Relevansi pendekatan ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan berbagai aktor dalam tata kelola inovatif.

(Velby & Yuadi, 2023) dalam kajiannya di *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (J-3P)* melakukan telaah meta-analitik atas praktik *Collaborative governance* dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Artikel ini menyoroti pentingnya desain kelembagaan dan fasilitasi kepemimpinan dalam menjaga kesinambungan kolaborasi lintas sektor. Karya ini memperkaya landasan teoritik tentang *governance* dan sangat mendukung analisis konseptual dalam skripsi yang mengkaji tata kelola toleransi.

Studi oleh (Subagyo & Rusfiana, 2019) yang dimuat di *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* menelaah sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial di Kota Tarakan. Kajian ini menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi antarlembaga menjadi elemen krusial dalam menjaga stabilitas sosial di daerah multietnis. Artikel ini dapat dijadikan referensi kontekstual tentang pentingnya kolaborasi institusional dalam wilayah rawan konflik sosial.

Terakhir, (Molla et al., 2021) dalam artikel yang diterbitkan oleh *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* membahas penerapan *Collaborative governance* dalam pengelolaan kampung wisata Praiijing di Sumba Barat. Dengan menggunakan kerangka Ansell dan Gash, penelitian ini menggambarkan dinamika kolaborasi yang terbentuk dari berbagai aktor lokal, termasuk pemerintah desa dan komunitas wisata. Artikel ini memberikan ilustrasi lapangan yang selaras dengan pendekatan kolaboratif dalam konteks pengelolaan sosial dan budaya lokal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan pendekatan dan fokus yang berbeda dari kajian-kajian sebelumnya terkait tata kelola sosial dan pembangunan kota toleran. Sebagian besar penelitian terdahulu banyak membahas konsep *Collaborative governance* secara umum atau praktik kolaborasi di kota-kota besar yang memiliki konteks sosial-politik berbeda, tanpa fokus pada kota multikultural yang berukuran kecil seperti Singkawang. Selain itu, studi tentang peran spesifik aktor lokal, terutama dalam mengelola keragaman sosial melalui mekanisme kolaboratif yang konkret dan berkelanjutan, masih sangat terbatas.

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada pemahaman empiris yang mendalam mengenai pelaksanaan *Collaborative governance* dalam mewujudkan kota toleran, dengan mengangkat secara khusus peran serta dinamika antara pemerintah daerah, komunitas budaya, dan kelompok masyarakat multietnis di Singkawang. Penelitian ini mengembangkan indikator baru yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan praktik dialog antar kelompok sebagai fondasi tata kelola kolaboratif yang efektif.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pemilihan informan yang representatif dari berbagai elemen pemangku kepentingan, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang kolaborasi sosial di tingkat lokal. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat teoritis atau kuantitatif dan kurang menggali interaksi sosial secara kontekstual (Sugiyono, 2018; Wahyudi & Ilham, 2021).

Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi signifikan secara konseptual dan praktis dalam memperkuat tata kelola sosial yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah plural seperti Singkawang (Warren, Sulaiman, & Jaafar, 2014).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan *Collaborative governance* dalam mewujudkan kota toleran di Kota Singkawang. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji peran aktor-aktor kunci dalam kolaborasi lintas sektor, dinamika kelembagaan yang terjadi, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan tata kelola kolaboratif dalam menjaga harmoni sosial dan keberagaman budaya. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif serta rekomendasi strategis bagi penguatan praktik kolaborasi yang adaptif dan berkelanjutan dalam konteks pengembangan kota toleran di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial berupa praktik *Collaborative governance* dalam konteks nyata Kota Singkawang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas interaksi sosial, proses kolaborasi antaraktor, serta dinamika kelembagaan yang tidak mudah diukur secara kuantitatif. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat menggali makna, perspektif, dan pengalaman para aktor secara lebih kaya dan kontekstual.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Wawancara dipilih agar memperoleh informasi langsung dari aktor-aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi, sedangkan observasi memperkuat pemahaman atas praktik nyata di lapangan, dan dokumentasi membantu melengkapi data terkait kebijakan dan aturan yang berlaku.

Informan dipilih secara purposif dengan pertimbangan keterlibatan aktif dan relevansi pengetahuan mereka terhadap kolaborasi antar pemangku kepentingan di Singkawang. Terdapat 10 informan utama, terdiri dari: pejabat pemerintah daerah yang menangani urusan sosial dan kebudayaan (informan kunci), tokoh masyarakat yang menjadi mediator antar

komunitas etnis, serta perwakilan organisasi keagamaan dan budaya yang berperan dalam dialog lintas kelompok. Informan kunci dipilih karena memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kota toleran serta penggerak utama kolaborasi di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan selama sembilan belas hari, di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan di lokasi tersebut dipilih karena Singkawang merupakan kota multikultural yang menjadi fokus studi mengenai tata kelola sosial dan pembangunan toleransi. Waktu penelitian disesuaikan agar mencakup periode aktivitas kolaborasi yang signifikan, termasuk pelaksanaan program-program kebudayaan dan dialog antar komunitas yang rutin berlangsung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami secara mendalam praktik *Collaborative governance* dalam mewujudkan kota toleran di Singkawang, penelitian ini menggunakan kerangka teori *Collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansel dan Gash (2016). Teori ini menguraikan enam karakteristik utama, partisipasi aktif, kemitraan antara pemerintah dan sektor lain, keputusan demokratis dan transparan, desentralisasi kekuasaan, penciptaan jaringan sosial dan kepercayaan, serta fleksibilitas dan adaptabilitas yang menjadi pijakan dalam menganalisis dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan. Keenam karakteristik tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana proses kolaborasi terbentuk, dijalankan, dan menghadapi tantangan dalam konteks pembangunan sosial dan budaya yang inklusif di Kota Singkawang.

3.1. Partisipasi Aktif

Menurut Ansel dan Gash (2016), partisipasi aktif merupakan karakteristik utama dalam *Collaborative governance* yang menandai keterlibatan nyata dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi. Dalam konteks Kota Singkawang, keterlibatan ini tercermin dari kehadiran dan kontribusi pemangku kepentingan dari berbagai sektor dalam pertemuan dan forum koordinasi yang diselenggarakan secara rutin oleh pemerintah daerah maupun komunitas.

Indikator pertama, yaitu keterlibatan dalam pertemuan pemangku kepentingan, memperlihatkan bahwa keberlangsungan kolaborasi sangat bergantung pada partisipasi langsung para aktor yang berkepentingan. Pemerintah daerah menginisiasi dialog lintas sektoral yang melibatkan tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, serta sektor swasta. Keterlibatan ini memungkinkan penyamaan persepsi dan pemecahan masalah secara bersama.

Sementara itu, indikator keberagaman pemangku kepentingan menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, yakni melibatkan berbagai kelompok sosial dan budaya secara representatif. Keberagaman ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan mewakili kepentingan seluruh masyarakat, mendorong inklusivitas, dan memperkuat legitimasi proses kolaborasi.

Meskipun partisipasi aktif telah berjalan, terdapat hambatan berupa ketidakmerataan keterlibatan beberapa kelompok, terutama komunitas minoritas dan elemen masyarakat yang kurang terorganisir. Faktor-faktor seperti kapasitas sumber daya manusia, informasi yang terbatas, dan kendala komunikasi turut memengaruhi tingkat partisipasi mereka. Oleh karena itu, peningkatan fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok tersebut menjadi hal yang krusial agar partisipasi aktif dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dimensi partisipasi aktif sesuai dengan karakteristik yang diuraikan Ansel dan Gash (2016) menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat ditentukan oleh keterlibatan yang luas, inklusif, dan bermakna dari berbagai pemangku

kepentingan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program di Kota Singkawang.

3.2. Kemitraan Pemerintah dan Sektor Lain

Kemitraan antara pemerintah dan sektor lain merupakan karakteristik esensial dalam *Collaborative governance* menurut Ansel dan Gash (2016), yang menekankan pentingnya sinergi antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Di Kota Singkawang, kemitraan ini terwujud melalui keterlibatan aktif pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas budaya dalam pelaksanaan program-program sosial dan kebudayaan.

Indikator keberagaman stakeholder dalam kemitraan menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan kapasitas berbeda. Keterlibatan lintas sektor ini memperkaya perspektif dan sumber daya yang tersedia sehingga memperkuat pelaksanaan program toleransi.

Selanjutnya, indikator tanggung jawab bersama menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program bukan hanya beban pemerintah semata, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif. Di Singkawang, hal ini tercermin dalam pengelolaan acara budaya dan dialog antar komunitas yang dijalankan bersama oleh berbagai pihak secara sinergis, sehingga memperkuat ikatan sosial dan mendorong keberlanjutan inisiatif toleransi.

Namun, tantangan yang muncul antara lain ketidakseimbangan kontribusi dan persepsi tanggung jawab, dimana beberapa aktor merasa peran mereka kurang dihargai atau terbatas dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme koordinasi dan komunikasi yang lebih baik agar kemitraan berjalan efektif dan inklusif.

3.3. Keputusan Demokratis dan Transparan

Karakteristik keputusan demokratis dan transparan menurut Ansel dan Gash (2016) menunjukkan bahwa dalam tata kelola kolaboratif, proses pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas.

Indikator kemudahan akses dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa di Singkawang, berbagai forum dan mekanisme konsultasi publik diadakan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan kelompok kepentingan menyampaikan aspirasi dan kritik secara langsung. Transparansi ini membantu membangun kepercayaan dan mengurangi konflik.

Sementara itu, indikator tingkat kepuasan masyarakat mencerminkan persepsi positif publik terhadap proses pengambilan keputusan. Meskipun banyak pihak merasa proses sudah cukup terbuka, beberapa kelompok minoritas masih mengeluhkan keterbatasan akses informasi dan kurangnya representasi yang memadai, yang dapat mempengaruhi rasa keadilan sosial dan inklusi.

Oleh karena itu, peningkatan mekanisme komunikasi publik dan penyebaran informasi yang merata menjadi hal penting untuk memperkuat transparansi dan demokrasi dalam pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat legitimasi tata kelola kota toleran.

3.4. Desentralisasi

Desentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab menjadi dimensi penting dalam *Collaborative governance* yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan dan sumber daya untuk mengelola masalah lokal secara efektif (Ansel dan Gash, 2016).

Indikator distribusi kewenangan mengacu pada pelimpahan otoritas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Singkawang, sehingga pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keberagaman sosial dapat disesuaikan dengan konteks lokal yang unik.

Selain itu, indikator kolaborasi pusat-daerah menggarisbawahi pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan berjalan selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam praktiknya, Singkawang menghadapi tantangan koordinasi administratif dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan toleransi.

Penguatan kapasitas pemerintah daerah dan mekanisme koordinasi lintas tingkat pemerintahan perlu terus ditingkatkan agar desentralisasi dapat memberikan manfaat maksimal dalam menjaga keharmonisan sosial di kota multikultural ini.

3.5. Jaringan Sosial dan Kepercayaan

Menurut Ansel dan Gash (2016), penciptaan jaringan sosial yang kokoh dan kepercayaan antaraktor menjadi fondasi utama dalam membangun kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan.

Indikator keterbukaan informasi menunjukkan bahwa di Singkawang, transparansi dan komunikasi terbuka antar kelompok sosial, pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan menjadi kunci dalam membangun saling pengertian dan mengurangi prasangka yang berpotensi memicu konflik.

Indikator komitmen menjaga hubungan kolaboratif menegaskan bahwa kepercayaan dibangun bukan hanya dari keterbukaan, tetapi juga dari konsistensi dan keberlanjutan interaksi antar aktor. Komitmen bersama ini terlihat dalam berbagai kegiatan bersama yang mempererat hubungan antar komunitas dan memperkuat jaringan sosial sebagai modal sosial kota toleran.

Meski demikian, tantangan muncul dari adanya ketidakpercayaan historis dan perbedaan budaya yang memerlukan waktu dan upaya terus menerus untuk diatasi agar jaringan sosial dan kepercayaan ini dapat tumbuh dan memberi dampak positif.

3.6. Fleksibilitas dan Adaptabilitas

Fleksibilitas dan adaptabilitas merupakan karakteristik krusial dalam *Collaborative governance* yang memungkinkan pengelolaan kebijakan dan strategi yang responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat (Ansel dan Gash, 2016).

Indikator kemampuan mengubah kebijakan atau strategi menunjukkan bahwa pemerintah dan aktor lain di Singkawang harus siap menyesuaikan program dan pendekatan mereka berdasarkan evaluasi dan dinamika lapangan, termasuk merespons isu-isu baru yang muncul dalam konteks keberagaman dan toleransi.

Indikator kemampuan menyelesaikan konflik secara fleksibel menegaskan pentingnya mekanisme mediasi dan dialog yang adaptif dalam menangani perselisihan sosial tanpa harus mengedepankan konfrontasi, sehingga dapat menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat.

Praktik fleksibilitas ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi tantangan konflik yang kompleks dan berlapis, agar kolaborasi tetap berjalan efektif dan tujuan pembangunan kota toleran dapat tercapai secara berkelanjutan.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa praktik *Collaborative governance* dalam mewujudkan kota toleran di Singkawang berlangsung melalui enam dimensi utama: partisipasi aktif, kemitraan pemerintah dan sektor lain, keputusan demokratis dan transparan, desentralisasi kekuasaan, jaringan sosial dan kepercayaan, serta fleksibilitas dan adaptabilitas. Masing-masing dimensi tersebut menunjukkan kekuatan sekaligus tantangan yang memengaruhi efektivitas kolaborasi lintas aktor dalam menjaga keharmonisan sosial dan keberagaman budaya.

Pada dimensi partisipasi aktif, keterlibatan beragam pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, komunitas adat, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil telah memberikan

kontribusi nyata dalam forum-forum dialog dan pengambilan keputusan. Namun, keberagaman dan tingkat keaktifan antar kelompok masih belum merata, terutama bagi kelompok minoritas yang menghadapi kendala akses dan kapasitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi telah berjalan, pemerintah perlu memperkuat fasilitasi agar inklusivitas dapat tercapai secara lebih optimal.

Kemitraan antara pemerintah dan sektor lain menunjukkan sinergi yang baik dalam pelaksanaan program-program sosial budaya. Keberagaman stakeholder dan rasa tanggung jawab bersama memperkuat implementasi kebijakan kota toleran. Namun demikian, beberapa aktor masih merasakan ketimpangan dalam pembagian peran dan kontribusi, yang berpotensi menghambat kolaborasi berkelanjutan jika tidak ditangani dengan mekanisme koordinasi yang lebih efektif.

Keputusan yang demokratis dan transparan telah tercermin melalui akses terbuka bagi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan serta tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap keterlibatan publik. Meski demikian, terdapat beberapa keluhan terkait keterbatasan informasi bagi kelompok tertentu yang membutuhkan peningkatan dalam sistem komunikasi publik dan penyebaran informasi.

Dimensi desentralisasi mengungkapkan bahwa distribusi kewenangan kepada pemerintah daerah memungkinkan penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal Singkawang. Namun, kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu diperkuat agar kebijakan yang dibuat lebih sinergis dan tidak terfragmentasi.

Jaringan sosial dan kepercayaan antar aktor menjadi modal sosial yang kuat dalam tata kelola kolaboratif. Keterbukaan informasi dan komitmen menjaga hubungan kolaboratif membantu membangun suasana saling percaya dan dukungan bersama. Kendati demikian, adanya perbedaan budaya dan sejarah ketidakpercayaan antar kelompok memerlukan upaya berkelanjutan untuk memupuk hubungan yang harmonis.

Terakhir, fleksibilitas dan adaptabilitas terlihat sebagai kunci dalam menghadapi dinamika sosial yang cepat berubah. Kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengubah kebijakan dan strategi serta menyelesaikan konflik secara fleksibel menjadi faktor penting dalam mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan kota toleran. Meskipun sudah ada mekanisme mediasi, peningkatan kapasitas adaptasi tetap diperlukan agar respons terhadap masalah sosial lebih cepat dan tepat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun *Collaborative governance* di Singkawang telah memberikan hasil positif dalam mewujudkan kota toleran, terdapat sejumlah kendala struktural dan proses yang harus diatasi. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan fasilitasi partisipasi inklusif, serta pembangunan jaringan sosial yang kokoh menjadi kunci keberlanjutan kolaborasi ini. Selain itu, pengembangan mekanisme fleksibilitas yang responsif terhadap perubahan sosial akan semakin memperkuat tata kelola toleransi yang adaptif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Collaborative governance* dalam mewujudkan kota toleran di Singkawang berjalan melalui enam dimensi utama, yakni partisipasi aktif, kemitraan lintas sektor, keputusan demokratis dan transparan, desentralisasi kewenangan, jaringan sosial dan kepercayaan, serta fleksibilitas dan adaptabilitas. Setiap dimensi memperlihatkan bagaimana berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, komunitas adat, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil berperan aktif dalam membangun harmoni sosial. Namun, kendala seperti ketimpangan partisipasi, ego sektoral, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan kurangnya mekanisme formal masih menghambat efektivitas kolaborasi.

Dengan mempertimbangkan keenam dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Collaborative governance* di Singkawang sudah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat toleransi sosial. Meski demikian, peran tersebut masih memerlukan penguatan, terutama melalui peningkatan inklusivitas partisipasi, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan mekanisme koordinasi dan penyelesaian konflik yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain ruang lingkup yang terbatas pada Kota Singkawang sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke kota multikultural lain dengan konteks sosial dan politik yang berbeda. Selain itu, jumlah informan yang relatif terbatas dan keterbatasan waktu pengumpulan data menjadi faktor yang membatasi kedalaman dan keluasan data. Beberapa informasi kelembagaan dan dinamika internal antar pemangku kepentingan sulit diakses sepenuhnya karena sensitivitas dan keterbatasan dokumentasi, sehingga interpretasi data dilakukan dengan pendekatan triangulasi dari berbagai sumber.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan geografis dengan melakukan studi komparatif di beberapa kota multikultural lain di Indonesia guna mendapatkan gambaran yang lebih holistik mengenai praktik *Collaborative governance* dalam pembangunan kota toleran. Pendekatan metode campuran (*mixed-method*) juga dapat digunakan untuk menggali tidak hanya perspektif para aktor kelembagaan, tetapi juga persepsi dan pengalaman masyarakat luas terkait efektivitas kolaborasi sosial. Selain itu, kajian mendalam mengenai mekanisme formal penyelesaian konflik dan penguatan jaringan sosial dalam konteks kolaborasi juga sangat dibutuhkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret dan aplikatif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada para informan dari Pemerintah Kota Singkawang, tokoh masyarakat, organisasi adat dan keagamaan, serta masyarakat sipil yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan. Terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan profesionalisme memberikan arahan dan masukan berharga. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan tata kelola kolaboratif yang inklusif dan berkelanjutan dalam mewujudkan kota toleran di Indonesia.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Br Sitepu, P. A., & Maulana, R. Y. (2021). Tata Kelola Program Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Konsep Collaborative Governance Dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 80–90. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1438>
- Cepiku, D., & Meneguzzo, M. (2011). Public administration reform in Italy: A shopping-basket approach to the new public management or the New Weberianism? *International Journal of Public Administration*, 34(1–2), 19–25. <https://doi.org/10.1080/01900692.2010.506088>

- Chumairah, S. M., & Al-Hamdi, R. (2019). Dinamika Toleransi Di Kota Besar Indonesia: Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan City of Tolerance. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(2), 175–183. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i2.540>
- Elston, T., Bel, G., & Wang, H. (2024). The effect of inter-municipal cooperation on social assistance programs: Evidence from housing allowances in England. *Journal of Policy Analysis and Management*, 1–29. <https://doi.org/10.1002/pam.22664>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(SUPPL. 1), 66–75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
- Kelvin, K., Widianingsih, I., & Buchari, R. A. (2022). Kolaborasi Model Penta Helix Dalam Mewujudkan Smart Village Pondok Ranji. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(November), 1–15. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2587>
- Lewis, J. (2018). Prevent as an Intractable Policy Controversy: Implications and Solutions. *Journal for Deradicalization*, Summer(15), 111–150.
- Maine, J. (2025). Municipal corporations in national and disciplinary contexts: A systematic literature review and future research agenda. *International Public Management Journal*, 28(2), 217–237. <https://doi.org/10.1080/10967494.2024.2438764>
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Onyango, G. (2024). Social Processes of Public Sector Collaborations in Kenya: Unpacking Challenges of Realising Joint Actions in Public Administration. In *Journal of the Knowledge Economy* (Issue 0123456789). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s13132-024-02176-5>
- Primastuti, A., Ika, S., Labolo, M., & Akbar, B. (2023). Analysis of Collaborative Actors in Regional Inflation Control Using Social Network Analysis. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 15(1), 1–18. <https://doi.org/10.33701/jtp.v15i1.2896>
- Sitompul, G. F., & Athahirah, A. U. (2016). COLLABORATIVE GOVERNANCE IN EDUCATION CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAMS IN PAHAE JULU, NORTH TAPANULI REGENCY, NORTH SUMATERA PROVINCE. *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA*, 15(1), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.1991>
- Subagyo, A., & Rusfiana, Y. (2019). SINERGI TNI AD DENGAN POLRI DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus Di Kota Tarakan). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8(2), 113. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v8i2.284>
- Velby, A. C., & Yuadi, I. (2023). Meta-Analitik Collaborative Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 8, 19–41. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v8i1.3455>